

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 20, 21 & 22 Januari 2018

Sumber Pengambilan Dokumen

A	BPK		
	1	Kalah Kasasi, DKI Harus Lunasi Bus Rp 56,43 Miliar	<i>Pikiran Rakyat/Hal.28</i>
	2	Sengkarut Anggaran Olahraga	<i>Kompas/Hal.1</i>
B	KOTA BANDUNG		
	1	Hilangkan Ego Sektoral	<i>Pikiran Rakyat/Hal.1</i>
C	KOTA BEKASI		
	1	Dana Hibah Rp175 M Dianggurkan	<i>Media Indonesia/Hal.21</i>

В Р К

Berita	: Kalah Kasasi, DKI Harus Lunasi Bus Rp 56,43 Miliar
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.28
Edisi	: Senin, 22 Januari 2018

# Kalah Kasasi, DKI Harus Lunasi Bus Rp 56,43 Miliar

Sebelumnya, BPK meminta DKI menarik lagi uang muka yang telanjur dibayarkan.

**Gangsar Parikesit**

[gangsar@tempo.co.id](mailto:gangsar@tempo.co.id)

**JAKARTA** — Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam sengketa pembelian 30 bus gandeng dan 35 bus tunggal Transjakarta melawan PT Ifani Dewi. Karena putusan Mahkamah itu,

Dinas Perhubungan harus melunasi sisa pembayaran dua kontrak pengadaan bus senilai Rp 56,43 miliar.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan akan mengkonsultasikan dulu putusan Mahkamah itu kepada Biro Hukum DKI Jakarta. Selebihnya, Sigit

enggan berkomentar. "Penyelesaiannya, ya terserah pada Dinas Perhubungan," kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana ketika dihubungi *Tempo*, kemarin.

Menurut putusan Mahkamah Agung, argumentasi Dinas untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak bisa diterima. "Dalil-dalil pelawan (Dinas) bukan merupakan alasan untuk melakukan permohonan pem-

batalan putusan arbitrase," demikian dalam salinan putusan Mahkamah Agung bertanggal 18 Juli 2016 itu.

Pada 2013, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta membuka lelang pengadaan 656 bus Transjakarta. PT Ifani Dewi memenangkan lelang pengadaan bus tunggal sebanyak 36 unit, bus sedang 124 unit, dan bus gandeng 30 unit. Nilai ketiga kontrak itu Rp 270,03 miliar. Dinas telah membayar uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak itu. Ifani juga telah

mendatangkan bus-bus tersebut.

Pada awal Februari 2014, Kejaksaan Agung mengusut dugaan kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta. Kejaksaan turun tangan setelah 40 bus baru—dari 126 bus yang diimpor dari Cina—ketahuan rusak dan berkarat. Sejumlah pejabat Dinas Perhubungan divonis bersalah karena terbukti korupsi secara bersama-sama. Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono, divonis 5 tahun penjara. Dua bawahan Udar, Drajad Adhyaksa dan Setyo Tuhu, divonis 5 dan 4 tahun penjara. Adapun Direktur Ifani Dewi, Agus Sudiarto, dihukum 12 tahun penjara.

Ifani Dewi kemudian menggugat Dinas Perhubungan yang tidak mau melunasi sisa pembayaran pengadaan bus itu ke BANI. Badan Arbitrase mengabulkan permohonan Ifani Dewi dan meminta Dinas melunasi sisa pembayaran. Dinas kemudian menggugat putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Pengadilan berpendapat sama dengan BANI. Dinas kemudian

mengajukan kasasi atas putusan itu ke Mahkamah.

Sejauh ini, pengurus PT Ifani Dewi belum memberikan pernyataan atas putusan Mahkamah Agung itu. Mantan kuasa hukum Ifani Dewi, Kurniawan Adi Nugroho, mengaku tidak mengetahui siapa kuasa hukum perusahaan setelah dia. "Secara legal, entitas, dan anggaran dasar (Ifani Dewi) masih ada, tapi sementara tidak beroperasi," ujar Kurniawan.

Berbeda dengan putusan MA, pada Agustus tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan agar pemerintah DKI menarik kembali uang muka yang telah dibayarkan untuk pengadaan 656 bus Transjakarta pada 2013. Nilai uang muka yang harus ditagih mencapai Rp 106,8 miliar. ●



# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Sengkarut Anggaran Olahraga

Entitas / Cakupan : BPK

Sumber / Hal : Kompas/Hal.1

Edisi : Senin, 22 Januari 2018

## Sengkarut Anggaran Olahraga

Merosotnya prestasi olahraga nasional dalam lima tahun terakhir tak lepas dari tata kelola anggaran yang buruk di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

JAKARTA, KOMPAS — Tata kelola anggaran masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan oleh Kemenpora. Tanpa perbaikan pengelolaan anggaran, prestasi olahraga nasional akan terus merosot. Ini tantangan berat, apalagi Badan Pemeriksa Keuangan tidak memberikan pendapat atau *disclaimer* pada laporan keuangan Kemenpora tahun anggaran 2015 dan 2016.

Dalam dokumen Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait alokasi anggaran Asian Games tahun anggaran 2016 dan Semester I/2017 Nomor 72/TPDPT Asian Games/11/2017 yang dilakukan BPK disebutkan, "Keterlambatan pembayaran honor maupun kegiatan TC (*training camp*), dan TO (*try out*) dapat memengaruhi produktivitas/pencapaian prestasi atlet nasional".

Dokumen PDTT itu memuat konsep temuan ketidakpatuhan pengelolaan anggaran terhadap peraturan perundang-undangan, setidaknya Rp 30 miliar. Konsep temuan itu menjadi peringatan bagi Kemenpora untuk segera berbenah agar BPK tidak kembali menyatakan *disclaimer* pada laporan keuangan 2017.

Salah satu konsep temuan itu adalah selisih pembayaran akomodasi atlet dan pelatih peserta pelatnas Program Indonesia Emas (Prima) Rp 27,2 miliar. Ada juga pengadaan peralatan olahraga yang berpotensi mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp 170,69 juta pada tahun anggaran 2016 dan minimal Rp 100,8 juta pada anggaran 2017.

Konsep temuan itu terkait anggaran yang dikelola Satlak

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

### Pokok-pokok Temuan BPK di Kemenpora 2015-2016

#### 2015

- Kelebihan Dana fasilitasi cabang olahraga

**Rp 3,65 miliar**

- Kelebihan Pembayaran publikasi

**Rp 290,21 juta**

- Kelebihan Pembayaran atas realisasi belanja Program Indonesia Emas

**Rp 1,37 miliar**

- Kekurangan

Volume pada pengadaan untuk PON XIX Tahun 2016 di Jawa Barat

**Rp 1,61 miliar**

- Kekurangan

Volume empat paket pekerjaan konstruksi

**Rp 364,82 juta**

#### 2016

##### Fasilitasi The 6th Tafisa World Sport For All Games 2016:

- Kelebihan pembayaran

**Rp 4,36 miliar**

- Realisasi dana yang belum dipertanggungjawabkan

**Rp 6,82 miliar**

- Dokumen pertanggungjawaban yang tidak diyakini kewajarannya

**Rp 69,60 miliar**

##### Fasilitasi persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018:

- Belanja barang belum didukung bukti pertanggungjawaban

**Rp 2,59 miliar**

- Kelebihan pembayaran

**Rp 2,13 miliar**

- Bukti tidak diyakini kewajarannya

**Rp 12,91 miliar**

- Sisa kas dana fasilitasi

**Rp 3,35 miliar**

Belanja perjalanan dinas pada Kemenpora tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dan terdapat kelebihan pembayaran

**Rp 2,99 miliar**

(sudah disetor ke kas negara Rp 216,63 juta)

Sumber: Utwang Kompas/GRH diolah dari Badan Pemeriksa Keuangan (Pisum) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 dan 2016

K

INFOGRAFIK DICKY



## Sengkarut Anggaran

(Sambungan dari halaman 1)

Prima sebelum dibubarkan pada Oktober 2017. Setelah Satlak dibubarkan, anggaran dikelola langsung oleh cabang olahraga.

Anggota III BPK, Acshanul Qosasi, menyatakan, permasalahan tata kelola keuangan di Kemenpora berkaitan dengan hal-hal yang paling mendasar. Artinya, permasalahan tersebut dimulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk itu, semua lini harus diperbaiki.

Atas dasar itu, Menpora Imam Nahrawi menginstruksikan, semua jajaran Kemenpora memperbaiki tata kelola penggunaan anggaran, terutama dalam hal pencatatan. Bagian kesekretariatan dan inspektorat juga diminta bersinergi untuk mengawasi penggunaan anggaran itu.

"Tahun ini, kita tidak boleh dapat status *disclaimer* lagi. Saya lesu dapat status itu, malu ketika bertemu dengan kementerian atau lembaga lain," ujar Menpora dalam Rapat Koordinasi Kemenpora di Cipanas, Jawa Barat, Jumat (19/1).

### Anggaran dan prestasi

Pengamat olahraga Djoko Pekik Irianto menyampaikan, di negara berkembang seperti Indonesia, olahraga sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah. Jika pemerintah gagal mengelola anggaran agar tepat sasaran, otomatis prestasi olahraga akan terus terpuruk.

"Persentase pengaruh anggaran terhadap prestasi olahraga di negara berkembang, seperti Indonesia, mencapai 70 persen. Bila tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, olahraga kita tidak akan bisa berkembang," ucap Djoko, Minggu (21/1).

Djoko menilai, Kemenpora belum berbenah. Buktinya, distribusi bantuan anggaran untuk cabang-cabang yang menggelar pelatnas Asian Games sempat tidak fokus pada peningkatan prestasi, dana cenderung dibagi rata.

pionships, 16-20 Februari di Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. Di antara para atlet ada Elga Kharrisma Novanda, peraih medali emas SEA Games 2017. Nomor lomba yang diikuti salah satunya *track sprint* yang menjadi andalan Indonesia untuk meraih medali emas Asian Games.

Manajer Tim Balap Sepeda Budi Saputro mengatakan, sejauh ini baru honor atlet dan pelatih yang sudah turun. "Tentu saja, (anggaran belum cair) mengganggu pelatnas. Tetapi, kami berusaha agenda yang ada tetap berjalan," ujarnya.

Untuk menyiasati anggaran yang belum cair, tim balap sepeda berangkat *training camp* dan uji coba dengan memakai dana talangan dari Pengurus Besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia.

Adapun tim atletik perlu menyiapkan atlet jalan cepat untuk tampil pada kejuaraan Asian Race Walking Championships, yang bergulir di Nomi, Jepang, pada Maret. Atlet-atlet pada nomor lomba lainnya akan mengikuti *training camp* dan uji coba di Eropa dan Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal PB PASI Tigor Tanjung mengatakan, belum turunnya anggaran belum terlalu memengaruhi pelatnas. "Namun, kalau keterlambatan berlanjut, kami khawatir rencana-rencana *training camp* dan *try out* akan berantakan," katanya.

Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, anggaran yang turun memang baru honor atlet dan pelatih. Kebutuhan lainnya, seperti akomodasi, peralatan, *training camp*, uji coba, dan suplemen, akan diproses pekan ini ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Proses pencairan anggaran di KPPN tidak membutuhkan waktu lama. Dalam sehari pun bisa cair asal dokumen lengkap.

Pencairan anggaran untuk 40 cabang yang berlarut-lurut itu mengindikasikan tata kelola anggaran masih perlu diperbaiki. Apalagi, kemampuan mengelola anggaran sangat berpengaruh

## SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Selain itu, proses pencairan anggaran juga berlarut-larut. Awalnya pencairan anggaran ditargetkan awal Januari ini, tetapi hingga kemarin belum juga cair. Sejumlah cabang dibuat kerepotan menyiasati problem itu. Padahal, sejak awal 2018, berbagai agenda pemusatan latihan, dan uji coba ke luar negeri, untuk pencapaian prestasi Asian Games 2018 telah menanti para atlet.

Agenda padat menanti, misalnya, untuk tim balap sepeda. Sabtu lalu, tim balap sepeda berangkat ke Malaysia untuk mengikuti *training camp* dan uji coba kejuaraan. Sembilan atlet dan empat pelatih berangkat untuk mengikuti Asian Track Cham-

terhadap capaian prestasi.

Prestasi olahraga Indonesia cenderung turun dalam lima tahun terakhir. Di SEA Games 2013, Indonesia finis keempat (65 emas, 84 perak, 111 perunggu). Namun, pada SEA Games 2015 posisi Indonesia turun ke peringkat ke-5 (47 emas, 61 perak, 74 perunggu). Pada SEA Games 2017 posisi Indonesia tetap ke-5, tetapi medali turun (38 emas, 63 perak, 90 perunggu).

"Buruknya prestasi Indonesia di sejumlah ajang multicabang beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari buruknya tata kelola anggaran untuk keolahragaan," kata pengamat olahraga Fritz Simanjuntak. (DNA/DRI/LAS)

**Pemerintah Kota  
Bandung**



Berita	: Hilangkan Ego Sektoral
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.1
Edisi	: Sabtu, 20 Januari 2018

Semua Sungai di Kota Bandung Menghadapi Masalah  
yang Sama

# Hilangkan Ego Sektoral

## BANDUNG, (PR).-

Puluhan anak Sungai Citarum yang melintasi Kota Bandung dipastikan menghadapi permasalahan serupa, yakni tumpukan sampah, tingginya laju sedimentasi, serta pencemaran. Sudah saatnya pemerintah daerah, lembaga, dan dinas-dinas menghilangkan ego sektoral dalam upaya penataan lingkungan.

Survei anak-anak Citarum dilakukan oleh Pemkot Bandung bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan Gerakan Citarum Harum, terutama Kodam III/Siliwangi, selama lima hari, 10-15 Januari 2018. Hasil survei menjadi rekomendasi penerbitan kebijakan yang menopang gerakan nasional tersebut.

"Survei ini membuat kita memiliki data akurat. Temuannya banyak, mulai dari tumpukan sampah hingga pembuangan limbah. Perlu upaya yang luar biasa," ujar Komandan Distrik Militer (Dandim) 0618/Berdiri Sendiri Arfin Dahlan dalam pemaparan hasil survei di Aula Balai Kota Bandung, Jumat (19/1/2018) siang.

Dalam paparan hasil survei, diketahui hampir semua sungai yang melintasi Kota Bandung memiliki permasalahan

berupa keberadaan tumpukan sampah. Di Cikapundung, misalnya, terdapat 41 titik tumpukan sampah atau yang terbanyak dari semua sungai yang disurvei. Menyusul di belakangnya Sungai Cipamokolan dengan 20 titik sampah.

Permasalahan pendangkalan atau sedimentasi sama saja. Di Cipamokolan ditemukan 24 titik sedimentasi, disusul Sungai Cidurian dengan 19 titik sedimentasi.

Permasalahan limbah juga ada di beberapa ruas sungai. Di Cibeureum ditemukan 7 pabrik yang membuang limbah ke sungai. Sementara, di Cinambo, tim survei menyoroti satu pabrik pembuangan limbah yang sudah berkali-kali dikeluhkan oleh masyarakat setempat, tetapi belum juga ada tindakan penerbitan.

Melihat permasalahan yang ada, Arfin

menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan penataan anak-anak Sungai Citarum di Kota Bandung. Semua pemangku kepentingan diharapkan turut berpartisipasi dalam program ini, entah lewat penganggaran atau pembuatan kegiatan di lapangan.

"Dulu SKPD mungkin jalan sendiri-sendiri. Sekarang kita sinkronkan. Kita dorong semua pemangku kepentingan mau terlibat dalam penataan. Banyak hal yang bisa dikerjakan," ucapnya.

Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan tim survei anak-anak Citarum ke Pemkot Bandung. Sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penataan sungai perlu dikerjakan segera. Keberpihakan anggaran juga mesti dimulai, baik lewat APBD maupun sum-

(Bersambung ke hal. 7 kol. 1)



# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

## BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

### **Hilangkan Ego**

(Sambungan dari hal. 1 kol. 7)

berpendanaan lain, termasuk dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

#### **Berubah**

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengklaim, Pemkot Bandung sudah melakukan banyak hal terkait dengan penataan sungai-sungai yang melintasi Kota Bandung.

Salah satunya, ia menyebut penugasan 2.000 petugas kebersihan yang siap siaga membersihkan sampah dan mengangkat endapan di sungai. Dalam sambutannya, Ridwan menyebut kondisi sungai-sungai di Bandung saat ini jauh lebih baik daripada kondisi sungai pada 2013 lalu.

Pada tahun anggaran 2018 ini, menurut dia, pemkot mengalokasikan dana Rp 110 miliar untuk penataan sungai. Ia sepakat untuk memprioritaskan pemanfaatan anggaran untuk menyokong Gerakan Citarum Harum. Di antaranya lewat proyek-proyek perbaikan sanitasi perumahan kumuh di bantaran sungai.

"Selain proyek-proyek fisik, proses edukasi menjadi sangat penting. Aparat kewilayahan dan ulama harus dilibatkan

dalam program ini," tuturnya.

Ridwan menyebut, pemkot saat ini menyiapkan beberapa program inovatif terkait dengan penataan sungai. Salah satunya adalah layanan antar jemput pengangkutan sampah besar, mulai dari kasur hingga lemari, oleh PD Kebersihan. Selama ini, sampah-sampah ukuran besar banyak dibuang ke sungai.

Sama seperti Arfin, Ridwan menyebut, salah satu kendala utama penataan lingkungan adalah masih adanya ego sektoral. Dengan program Citarum Harum, ia berharap akan ada koordinasi dan sinkronisasi yang lebih kuat.

#### **Dua wilayah**

Camat Cibiru Ayi Witarsa menyatakan, penanganan sungai-sungai di wilayah Cibiru, perbatasan dengan Kabupaten Bandung, harus melibatkan masyarakat dua wilayah.

"Selama ini, masyarakat mengandalkan petugas kebersihan (Gober) untuk membersihkan aliran sungai di wilayah Cibiru. Mereka beranggapan, sampah yang sampai ke wilayah mereka berasal dari wilayah Kabupaten (Bandung),"

ujaraya dalam rapat koordinasi dengan jajaran lurah se-Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jumat (19/1/2018).

Ia mengungkapkan, di Cibiru, terdapat tiga sungai yang berasal dari wilayah Kabupaten Bandung dan ketiganya bermuara di Sungai Citarum. Sungai Pasanggrahan (Cisurupan) berasal dari Cilengkrang, Kecamatan Cimeunan. Sementara, dua sungai, yakni Cipariuk dan Cibiru (Cikudang) berasal dari Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi.

Saat ini, kondisi Sungai Pasanggrahan tercemar akibat polusi kotoran dari peternakan sapi dan pabrik tahu. "Ke depan akan kami beri arahan agar peternak ataupun pemilik pabrik tahu membuat *septic tank*," ujarnya.

Sementara, Sungai Cipariuk dan Cibiru selama ini sering dituduh sebagai aliran sungai yang paling banyak sampahnya.

"Setelah kami lakukan penanganan, ternyata sampah sudah mulai masuk dari permukiman di wilayah Kabupaten (Bandung). Bila hujan deras, pasti langsung ke Cikeruh. Saat hujan deras minggu lalu, kami mendapatkan kasur," tuturnya. (Retno Heriyanto, Tri Joko Her Riadi)\*\*\*

**Pemerintah Kota  
Bekasi**



Berita : Dana Hibah Rp175 M Dianggurkan

Entitas / Cakupan : Kota Bekasi

Sumber / Hal : Media Indonesia/Hal.21

Edisi : Senin, 22 Januari 2018

# Dana Hibah Rp175 M Dianggurkan

**P**EMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi menyia-nyia-kan dana hibah sebesar Rp100 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dana hibah tahun 2017 itu seharusnya untuk pembangunan dua jembatan di sana. Pemkot Bekasi beralih tidak memiliki dana untuk pembebasan lahan di wilayah pembangunan dua jembatan tersebut. Sebab, dana hibah itu hanya untuk pembangunan fisik saja. Akibatnya, anggaran teknis yang bersumber dari dana hibah DKI Jakarta 2017 tidak terserap.

"Mereka hanya memberikan dana untuk pembangunan fisik, tetap kalau ada pembebasan lahan itu tanggung

jawab pemerintah daerah," jawab Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Arif Maulana kemarin.

Arif menjelaskan, pembangunan dua jembatan yang masih belum terlaksana yaitu pembangunan Jembatan Cipendawa-Bojongmenteng dan Jembatan Rawapanjang. Kedua jembatan ini dibangun sebagai sarana penunjang mobilitas truk sampah DKI Jakarta yang melaju menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Dalam pembangunan Jembatan Rawapanjang, Pemkot Bekasi mendapatkan dana bantuan sebesar Rp100 miliar. Dana tersebut sama sekali be-

lum tersentuh. Adapun untuk pembangunan jembatan Cipendawa-Bojongmenteng, pemerintah mendapatkan dana bantuan sebesar Rp100 miliar, Rp25 miliar di antaranya sudah berhasil diserap. Total dana yang tidak terserap sebesar Rp175 miliar.

"Dananya masih ada di kas daerah," kata Arif tanpa menyebut berapa bunga yang didapat dari dana yang mengendap tersebut.

## Janji lagi

Untuk mengoptimalkan dana hibah yang tidak terserap itu, ungkap Arif, tahun ini pihaknya sudah meminta agar anggaran tersebut dialihfungsi-

kan menjadi anggaran pembebasan lahan. Namun, hal itu tidak diizinkan sebab pengajuan proposal permohonan dana hibah tersebut adalah untuk pembangunan fisik.

"Daripada mubazir, karena kemampuan kami membebaskan lahan amat terbatas, diusulkan agar dana hibah itu untuk pembebasan lahan. Tapi, tidak bisa karena laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan permohonan di awal," jelas Arif.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan SDA, Tri Adhianto menyampaikan, pada 2017, Pemkot Bekasi mendapat dana hibah sebesar Rp300 miliar. Dana tersebut di luar ang-

garan *community development* dan *tipping fee* yang harus dibayarkan Pemerintah DKI Jakarta pada warga Bantargebang sebagai kompensasi keberadaan TPST di wilayah mereka.

"Tahun ini (2018) dengan serapan yang minim, seperti halnya (dana hibah dari Pemprov DKI) akan berkurang jumlahnya," kata Tri.

Meski demikian, Tri mengaku tidak berkecil hati. Pihaknya tetap akan memaksimalkan dana hibah yang sudah ada di kas daerah. Targetnya, akhir November 2018 pembangunan dua jembatan itu sudah selesai. Sebelumnya ditargetkan jembatan tersebut selesai akhir 2017 dan awal 2018. (Gan/J-3)